ANALISIS HUKUM PERJANJIAN TERAPEUTIK SECARA ELEKTRONIK MENURUT HUKUM PERJANJIAN DAN UU ITE

Donnallo Debora

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: donnallodebora@gmail.com

Article	Abstrak
<p>Keywords: Perlindungan Hukum, Perjanjian Terapeutik, Tanggung jawab</p> <p>Artikel History Received: May 17 2024 Reviewed: May 20 2024 Accepted: July 23 2024</p> <p>DOI:LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The positive impact of online health services is that people can ask doctors anytime and anywhere via cellphones/smartphones about their health problems. However, the negative impact is how does the doctor know the true condition of the patient's body, what limitations does the doctor have in giving an opinion on the health problem, in terms of patient responsibility, who will be responsible if the patient experiences problems or complications during treatment carried out in online-based health services? Some potential legal issues that may arise in the future in online medical services include the granting of licenses to practice through online, data protection of patient privacy rights, and liability if there are parties who suffer losses. Considering that online practice cannot be equated with conventional practice, because previous laws have not been able to accommodate online-based medical services, patients as service recipients need to get legal protection.</i></p> <p>Dampak positif dari layanan kesehatan online ialah orang dapat bertanya kapanpun dan dimanapun kepada dokter melalui HP/Smartphone tentang masalah kesehatannya. Namun, dampak negatifnya adalah bagaimana cara dokter mengetahui dengan benar kondisi tubuh pasien tersebut, apakah batasan yang dimiliki dokter dalam memberikan pendapat mengenai masalah kesehatan tersebut, dalam hal tanggung jawab pasien, siapa yang akan bertanggung jawab jika pasien mengalami masalah atau komplikasi selama pengobatan yang dilakukan dalam pelayanan Kesehatan berbasis online? Beberapa potensi permasalahan hukum yang dapat timbul pada layanan medis online dikemudian hari, diantaranya yaitu mengenai pemberian lisensi praktik melalui online, perlindungan data hak privasi pasien, serta tanggung gugat bila ada pihak yang mengalami kerugian. Mengingat praktik melalui online ini tidak dapat dipersamakan dengan praktik konvensional, karena pada undang-undang sebelumnya belum dapat mengakomodir layanan medis berbasis online, Pasien sebagai penerima layanan perlu mendapatkan perlindungan hukum.</p>

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Kesehatan adalah keadaan (hal) sehat, kebaikan keadaan (badan dan sebagainya) kesehatan jasmani; kesehatan jiwa, sedangkan Sehat yaitu baik seluruh badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit) sehat akal; sehat dan afiat, dan lain sebagainya,¹ Kesehatan dan sehat adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Pemahaman tentang kesehatan telah bergeser seiring berjalan waktu. Berkembangnya pengetahuan menjadi tuntutan tersendiri bagi pelayan Kesehatan untuk memberi layanan Kesehatan semakin baik dan dengan keadaan pasien yang kompleks pula, bahkan kritis. Hal tersebut tidak lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Kesehatan, terutama yang berhubungan dengan pengobatan dan diagnosis yang tidak luput dari alat-alat modern yang sebelumnya tidak dikenal.² Salah satunya adalah layanan Kesehatan berbasis digital telah memungkinkan setiap orang untuk mempelajari dan menilai diri mereka sendiri, dan berpartisipasi aktif dalam gerakan promosi kesehatan. Berbagai faktor sosial berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, seperti perilaku individu, kondisi sosial, genetik dan biologi, perawatan kesehatan dan lingkungan fisik. Seiring berjalannya waktu makna dari kesehatan semakin berkembang dalam pendapat model biomedis, definisi awal kesehatan berarti kemampuan tubuh untuk berfungsi. Kesehatan dipandang sebagai kondisi tubuh yang berfungsi normal yang dapat terganggu oleh penyakit dari waktu ke waktu.

Selama pandemi *Covid-19*, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk membatasi aktivitas masyarakat, seperti kampanye "*stay at home*" dan pembatasan aktivitas di tingkat lokal, dalam upaya untuk mengendalikan penyebaran virus. Ketakutan akan penularan *Covid-19* membuat banyak orang enggan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan mereka. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan *Online* melalui *platform* kesehatan semakin diminati. Namun, masalah yang muncul adalah bahwa pelayanan kesehatan *Online* tidak memungkinkan dokter untuk melakukan pemeriksaan fisik langsung terhadap pasien, sehingga ada potensi kesalahan dalam diagnosis penyakit pasien.³ Kesalahan dalam diagnosis ini dapat menyebabkan kerugian bagi pasien yang menggunakan layanan *Telemedicine*. Negara ini telah mengadopsi teknologi kesehatan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan secara *Online*, layanan ini bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang mudah, kapan saja, dan di mana saja, tanpa memerlukan kunjungan ke rumah sakit atau pertemuan langsung dengan tenaga medis profesional. Konsep ini dikenal sebagai *Telemedicine*. Dalam pandangan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), *telehealth* atau *Telemedicine* adalah penyediaan layanan kesehatan di mana pasien dan penyedia layanan berada pada lokasi yang terpisah. *Telehealth* atau *Telemedicine* memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pertukaran informasi terkait diagnosis, pengobatan penyakit dan cedera, penelitian, evaluasi, serta pendidikan profesional kesehatan. Meskipun layanan kesehatan melalui *Telemedicine* memiliki manfaatnya, terdapat beberapa permasalahan yang dapat berpotensi merugikan pasien atau pengguna layanan tersebut. Salah satu kelemahan dalam penggunaan layanan ini adalah kemungkinan kesalahan dalam diagnosis yang ada dalam perjanjian Terapeutik yang dilakukan oleh dokter. Kesalahan diagnosis tersebut bisa terjadi karena dokter tidak memiliki akses yang memadai untuk menilai kondisi pasien secara menyeluruh melalui prosedur yang seharusnya dijalankan. Selain itu, masih terdapat ketidakjelasan dalam regulasi terkait layanan kesehatan ini, terutama dalam hal konsultasi antara dokter dan pasien. Perjanjian Terapeutik berasal dari kata

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, s.v. "Kesehatan" dan "sehat" diakses tanggal 5 November 2023.

² Sutarno, *HUKUM KESEHATAN Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*, Malang, SETARA Press, 2014, hlm.1.

³ Ni Luh et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menderita Kerugian Akibat Salah Diagnosis Dalam Platform Layanan Kesehatan Online" *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10, No. 8, Tahun 2022, hlm. 646.

therapeutik yang artinya “ dalam bidang pengobatan”, makna dari Terapeutik juga mencakup dalam bidang-bidang lain, perjanjian Terapeutik merupakan bentuk persetujuan yang terjadi antara dokter (sebagai tenaga medis) dengan pasien bukan hanya di bidang pengobatan saja, namun mencakup lebih luas lagi, seperti bidang diagnostik, promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.⁴ Perjanjian ini juga dikenal dengan suatu perjanjian atau transaksi atau kontrak Terapeutik. Istilah dari transaksi Terapeutik digunakan pada peristiwa terjadinya hubungan profesional antara dokter dan pasiennya, yang berkaitan dengan usaha untuk memperoleh kesembuhan.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Perjanjian Terapeutik Secara *Online* di Indonesia.

Transaksi Terapeutik merupakan suatu bentuk perjanjian, yang harus berlandaskan pada ketentuan dalam Buku III KUHPerdara, yaitu perjanjian untuk melakukan jasa yang diatur dalam ketentuan khusus. Karena transaksi Terapeutik merupakan suatu kategori perjanjian tidak Bernama yaitu “Perjanjian yang tidak dikenal dengan nama tertentu dalam KUHPerdara, namun tetap tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdara sebagaimana ketentuan pada pasal 1319 KUHPerdara yaitu *Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.*”

Akibat hukum dari dilakukannya hubungan hukum perjanjian (termasuk juga perjanjian Terapeutik) tertuang dalam pasal 1338, pasal dan 1320 KUHPerdara sebagai berikut:

- Pasal 1338 KUHPerdara
”Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
- Pasal 1320 KUHPerdara tentang *Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah, Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;*
 - (1) *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
 - (2) *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
 - (3) *suatu pokok persoalan tertentu;*
 - (4) *suatu sebab yang tidak terlarang.*
 - (5)

B. Tanggung Jawab Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis Terkait Perjanjian Terapeutik Secara *Online*.

1. Klasifikasi Diagnosis

Diagnosa adalah identifikasi sifat-sifat penyakit atau kondisi atau membedakan satu penyakit atau kondisi dari yang lainnya. Penilaian dapat dilakukan melalui pemeriksaan fisik, tes laboratorium, atau sejenisnya, dan dapat dibantu oleh program komputer yang dirancang untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan. Penentuan penyakit pasien adalah fungsi

⁴ Ayun Sriatmi, *Hukum Perjanjian Terapeutik, Etika dan Hukum Kesehatan*, Bahan Ajar, Fakultas Kesehatan Masyarakat Univ. Diponegoro, Semarang, https://docpak.undip.ac.id/id/eprint/11896/1/Aspek_Hukum_Perjanjian_Terapeutik.pdf diakses pada tanggal 19 Januari 2024.

utama dari dilakukannya diagnosis terhadap pasien yang melalui beberapa tahapan pemeriksaan, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik sampai pada pemeriksaan penunjang lainnya. Kewenangan dokter (umum, spesialis maupun dokter gigi) yang terdaftar surat tanda registrasi dalam melakukan tugas sesuai dengan kompetensinya.⁵ menurut Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

- a. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
- b. memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga rahasia Kesehatan Pasien;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e. merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Kesalahan diagnosa merupakan salah satu bentuk dari resiko dalam pemberian pelayanan kesehatan melalui *Telemedicine*. Perlu diingat bahwa pelayanan kesehatan *Telemedicine* ini merupakan pelayanan kesehatan jarak jauh, sehingga proses diagnosa yang dilakukan oleh dokter tidak sebaik jika dilakukan secara tatap muka antara dokter dan pasien. Karena proses diagnosa yang dilakukan dokter tidak dilakukan secara bertatap muka dengan pasien maka akan berpotensi untuk timbulnya kesalahan diagnosa. Keterbatasan dokter untuk melihat secara jelas tentang apa yang terjadi kepada pasien juga turut mempengaruhi ketepatan dokter dalam melakukan diagnosa. Perlu diingat bahwa ketepatan dokter dalam melakukan diagnosa sangat terpengaruh jika dokter tersebut tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien yang bersangkutan. Kemampuan dan kompetensi dokter juga turut mempengaruhi ketepatan diagnosa yang dilakukan oleh dokter.⁶

2. Pertanggung Jawaban Hukum oleh Dokter Atas Kesalahan Diagnosis Online.

Ketentuan hukum dalam hal menuntut dokter akibat kesalahan diagnosis yang dilakukannya berdasarkan contoh kasus yang ada. Seorang dokter harus berpegang pada kode etik dan dapat bertanggungjawab disiplin atas profesi, bertanggungjawab dalam Tindak Pidana.

A. Tanggungjawab Etika

Peraturan yang mengatur tanggung jawab etis dari seorang dokter adalah kode etik kedokteran indonesia dan lafal sumpah dokter. Kode etik adalah pedoman perilaku, kode etik indonesia dikeluarkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 111/PB/A.4/02/2012. Adapun Lembaga Profesi yaitu Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) yang merupakan majelis khusus tenaga medis, sehingga berlaku pada kalangan kedokteran yang berfungsi melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian pelaksanaan etika kedokteran oleh dokter. Tugas khusus MKEK adalah melakukan penanganan pelanggaran (pengaduan) etika kedokteran. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pertanggungjawaban kode etik kedokteran yaitu : akibat dari perbuatan tersebut terhadap kehormatan profesi, akibat bagi kebaikan pasien, akibat bagi kepentingan umum dan faktor luar termasuk faktor pasien yang ikut mendorong terjadinya pelanggaran serta tujuan yang ingin dicapai pelaku. Sidang akhir dari MKEK yaitu dengan membuat keputusan tentang ada tidaknya pelanggaran etik dalam hal ini

⁵ Dian Mauli, "Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien", *Jurnal Cepalo*, No. 1, Vol. 2, Tahun 2019, hal. 35.

⁶ Dionisius *et al*, *Op. Cit*

pelanggaran akibat kesalahan diagnosis; identifikasi pasal KODEKI yang dilanggar yaitu pasal 8 Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 111/PB/A.4/02/2012 "Seorang dokter wajib, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (*compassion*) dan penghormatan atas martabat manusia". Perumusan kualitas pelanggaran ringan sedang atau berat. Sesuai dengan jenis pelanggarannya MKEK membuat saran tertulis kepada Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk mencabut Izin Praktik Selama 3 Bulan (pelanggaran ringan, 6 bulan (pelanggaran sedang, dan 12 bulan (pelanggaran berat).

B. Tanggungjawab Disiplin.

Pelanggaran terhadap disiplin ini akan ditangani oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Sebagai Lembaga independen dan bertanggungjawab kepada Korsil kedokteran Indonesia. MKDKI ini berwenang memberikan sanksi Disiplin diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 306 ayat :

- (1) Pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3) diberikan sanksi disiplin berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut;
 - c. Penonaktifan STR untuk sementara waktu; dan/atau
 - d. Rekomendasi pencabutan SIP.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- (3) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijatuhkan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tanggungjawab Perdata

Pada hakikatnya hubungan antar dokter dan pasien merupakan suatu hubungan perdata yang terjadi karena adanya suatu kesepakatan. Di dalam konsep hukum perdata, adanya cidera janji (*wanprestasi*) atau perbuatan melawan hukum (hingga menimbulkan kerugian kepada pasien) yang dilakukan oleh dokter maka kepadanya dapat dimintakan ganti rugi. Seorang Dokter atau tenaga Kesehatan harus bertanggung jawab secara perdata apa bila melakukan hal-hal berikut ini:

- 1) Melakukan Wanprestasi (Pasal 1239 KUHPperdata)
Wanprestasi artinya keadaan dimana seorang tidak memenuhi kewajibannya yang di dasarkan pada suatu perjanjian. Menurut Ilmu Hukum Perdata, seorang dokter dianggap melakukan wanprestasi apabila:
 - a) Hubungan yang timbul antara dokter dan pasien berdasarkan suatu perjanjian terapeutik.
 - b) Dokter memberikan pelayanan Kesehatan yang tidak patut, yang telah meyalahi tujuan perjanjian terapeutik.
 - c) Pasien menderita kerugian akibat Tindakan dokter tersebut.

- (1) Pasien dapat meminta pertanggungjawaban seorang dokter atas kesalahan diagnosis yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan atau tenaga medis menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yaitu :⁷

Pasal 305 Ayat (1)

“Pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan atas tindakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dalam memberikan Pelayanan Kesehatan dapat mengadukan kepada majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”.

Pasal 308 Ayat (2)

“Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”.

Pasal 310

“Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan”.

- (2) Kedudukan pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan dan dokter/tenaga kesehatan sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa pelayanan kesehatan beralasan bahwa pasien agar selalu pasien berpedoman pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian Sengketa seorang dokter atas kesalahan diagnosis yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

Pasal 45 Ayat (1) dan (2)

(1) *Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.*

(2) *Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.*

Pasal 47

“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”.

- (3) Penyelesaian Sengketa dokter atas kesalahan diagnosis yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Atas Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik yaitu :

Pasal 38 Ayat (1) dan (2)

(1) *Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.*

⁷ Bayu Wijanarko et al eds,” TINJAUAN YURIDIS SAHNYA PERJANJIAN TERAPEUTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN”, *Jurnal Article*, No.3, Vol. 105, hal. 11.

Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Perjanjian terapeutik secara *online* pada aplikasi seperti *halodoc* pada dasarnya merupakan suatu bentuk transaksi yang termasuk dalam kategori perjanjian yang belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Sehingga pengaturan hukum yang ada masih belum mampu menjawab validitas, kepentingan pasien dan praktisi kesehatan serta resiko keamanan dan privasi data dalam platform *online* dengan melihat platform Halodoc merupakan platform yang banyak digunakan masyarakat Indonesia. Pertanggung Jawaban dokter terhadap kesalahan diagnosis yang dilakukan dalam layanan Kesehatan online sehingga menimbulkan kerugian terhadap pasien maka dapat dilakukan upaya berupa pengaduan terhadap Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Pertanggungjawaban dokter atas dasar perbuatan melawan hukum, cidera janji atau wanprestasi dapat dijatuhi hukuman pidana dan tanggungjawab perdata serta dapat dikenakan sanksi-sanksi lainnya seperti sanksi kode etik dan disiplin profesi kedokteran sebagai seorang tenaga kesehatan. Seluruh tanggung jawab kesalahan diagnosis yang dilakukan dokter terhadap pasien ditanggung oleh dokter tersebut, tuntutan terhadap kesalahan tersebut tidak dapat mengikut sertakan aplikasi Halodoc dikarenakan ketentuan dari aplikasi tersebut hubungan antara dokter dan aplikasi merupakan hubungan kemitraan.

Saran

Demi terselenggaranya pelayanan kesehatan dalam bentuk konsultasi dokter online dengan benar dan aman maka dibutuhkan peraturan khusus yang mengaturnya. Hal ini berdampak bagi hak pasien yang berhak menerima pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas dan dengan standar yang setinggi-tingginya. Kekosongan hukum saat ini membuat celah bagi penyimpangan untuk terjadi. Beberapa saran dari penulis adalah:

1. Saran bagi Kementrian Kesehatan / Pemerintah:
 - a. Menerbitkan produk hukum yang khusus mengatur mengenai konsultasi dokter online mengingat maraknya pelaksanaannya di masyarakat saat ini.
 - b. Membuat kaidah standar pelayanan konsultasi dokter secara online, termasuk di dalamnya kewenangan dan batasan pelaksanaan konsultasi online bagi dokter maupun pasien.
 - c. Menggunakan Layanan Kesehatan online hanya pada keadaan situasi darurat, yang benar-benar tidak memungkinkan untuk dokter dan pasien bertemu secara tatap muka, untuk mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien.
2. Saran bagi Penyedia Layanan :
 - a.. Memberikan edukasi dan promosi yang gencar kepada pasien terkait pelaksanaan konsultasi online yang baik dan benar. batasan dan peraturan terkait pelaksanaan konsultasi secara online sehingga pasien memahami cara penggunaan dan haknya dalam konsultasi online.
 - b. Tidak melimpahkan tanggung jawab seluruhnya kepada Dokter namun ikut serta Bertanggungjawab atas semua hal yang terjadi dalam layanan Kesehatan online

tersebut. Termasuk jika ter dapat kesalahan yang merugikan pasien selaku konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2016.
- Ayun Sariatmi, *Hukum Perjanjian Terapeutik, Etika dan Hukum Kesehatan*, Bahan Ajar, Fakultas Kesehatan Masyarakat Univ. Diponegoro,
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teoro dan Analisa Kasus*, Prenadamedia grub, Jakarta, 2014.
- Sutarno, *HUKUM KESEHATAN Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*, SETARA Press, Malang, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (burgelijk wetboek)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Peraturan Korsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Klinis Dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia.

C. Jurnal

- Bayu Wijanarko, "TINJAUAN YURIDIS SAHNYA PERJANJIAN TERAPEUTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN", *Juornal Article* 105, no.3
- Dian Mauli, "Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien", *Jurnal Cepalo* 2, No. 1, Tahun 2019.
- Dionisius, Surya Ernawan, "Tanggung Gugat Dokter Akibat Kesalahan Diagnosa Terhadap Pasien Dalam Layanan Kesehatan *Telemedicine*, *Jurist-Diction* 5, no. 5, September 2022.
- Ni Luh, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menderita Kerugian Akibat Salah Diagnosis Dalam *Platform* Layanan Kesehatan *Online* " *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10, No. 8, Tahun 2022

D. Website

- Halodoc, "Syarat Dan Ketentuan Pengguna Halodoc" 22 Januari 2024, <https://www.halodoc.com/syarat-dan-ketentuan> diakses tanggal 20 Februari 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online* , s.v. "Kesehatan" dan "sehat" diakses tanggal 5 November 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesehatan>